

BELAJAR TOLERANSI DI PONDOK PESANTREN GONTOR PONOROGO**Hasan Bastomi**STAIN Kudus Jawa Tengah
*E-mail: bastommy@stainkudus.ac.id***Abstrak**

Dalam kurun waktu 2010-2013 peristiwa intoleransi di Indonesia semakin meningkat, belum ditambah dengan deretan kasus lainnya dari tahun 2014 hingga tahun 2017. Gejala intoleransi di Indonesia memanas seiring dilaksanakannya aksi yang mengatasnamakan pembelaan agama. Mulai dari aksi damai 411 hingga aksi 212 pada penghujung tahun 2016 dan aksi 212 jilid II di awal tahun 2017. Padahal sebagai masyarakat Indonesia selayaknya menjaga keharmonisan di tengah kebhinekaan dengan sikap toleransi. Toleransi dalam Islam lebih dari sekedar toleransi atau kemauan untuk menerima ketidaksepakatan yang genuine tapi di dalamnya juga terkandung ihsân (kebaikan) kepada orang lain yang membawa kecintaan kepada seseorang yang diberikan kepadanya kebaikan, dan mengarahkan pada kecintaan, keharmonisan, serta menjauhkan manusia dari kekerasan dan alienasi. Berbicara tentang toleransi kita bisa belajar dari potret Pondok Pesantren Gontor Ponorogo. Gagasan untuk membangun Gontor menjadi pondok pesantren yang menanamkan nilai-nilai toleransi berawal dari situasi sosial dan politik bangsa Indonesia berpengaruh pula pada pendidikan. Wawasan toleransi sesungguhnya telah menjadi pendidikan dasar yang tidak hanya diajarkan dalam pengajar formal di kelas saja tapi juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari santri. Pendidikan toleransi di pondok Gontor juga tercermin dari muatan atau isi kurikulum yang kentara mengajarkan wawasan santri akan keragaman keyakinan. Dalam hal toleransi Pondok Gontor diibaratkan sebagai miniatur Indonesia yang terdapat ribuan santri dengan berbeda latar belakang serta ras. Namun dengan perbedaan tersebut, seluruh santri di Gontor bisa saling menghargai.

Kata Kunci: *Toleransi, Pesantren Gontor***Abstrack**

In the period 2010-2013 the incidence of intolerance in Indonesia is increasing, not to be added with other rows of cases from 2014 until 2017. Intolerance turmoil in Indonesia heats up as the implementation of actions in the name of defense of religion. Starting from peaceful action 411 to action 212 at the end of 2016 and action 212 volumes II in early 2017. Whereas as the people of Indonesia should keep harmony in the midst of diversity with a tolerance. Tolerance in Islam is more than tolerance or willingness to accept genuine disagreements but it also contains ihsân (goodness) to others who bring love to someone who is given to him goodness, and leads to love, harmony, and keeps people away from violence and alienation . Speaking of tolerance we can learn from the portrait of Pondok Pesantren Gontor Ponorogo. The idea to build Gontor into a boarding school that instilled the values of tolerance originated from the social and political situation of the Indonesian nation also affect the education. The insight of true tolerance has become a basic education that is not only taught in formal teachers in the classroom. But also done in the daily life of santri. The tolerance education at Gontor's cottage is also reflected in the content or content of the curriculum that clearly teaches the santri's insight into the diversity of beliefs. In terms of tolerance Pondok Gontor diibaratkan as miniature Indonesia there are thousands of students with different backgrounds and races. But with the difference, all students in Gontor can appreciate each other.

Keyword: *Tolerance, Gontor Of Pesantren*

PENDAHULUAN

Tanggal 6 Desember 2016 lalu di Bandung terjadi aksi pembubaran paksa acara kebaktian di kompleks Sasana Budaya Ganesha (Sabuga). Kemudian sehari setelahnya, ada penurunan paksa baliho Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta karena menampilkan sosok mahasiswi berjilbab pada iklan penerimaan mahasiswa baru kampus itu. Selang tiga hari setelah insiden tersebut, sembilan warga Muslim yang datang ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, untuk mengikuti acara keagamaan di Atambua, Belu, diusir oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Brigade Meo Timor. Dan di tahun 2016 terakhir aksi “sosialisasi” fatwa MUI oleh beberapa organisasi massa, antara lain Front Pembela Islam (FPI), terjadi di sejumlah restoran dan pusat perbelanjaan di Bekasi, Solo, Yogyakarta dan Surabaya (www.voaindonesia.com/2016/12/9).

Koordinator Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) Komnas HAM Jayadi Damanik mengatakan, jumlah kasus intoleransi pada tahun 2016 terus mengalami peningkatan jika dibandingkan dua tahun sebelumnya. Tren peningkatan kasus intoleransi mengkhawatirkan kebhinekaan Indonesia.

Pada tahun 2014, Komnas HAM mencatat ada 74 kasus intoleransi yang dilaporkan ke pos pengaduan Desk KBB. Tahun 2015, jumlah pengaduan meningkat, yaitu 87 kasus dan Tahun 2016 hampir 100 kasus yang mana pelanggaran HAM terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan terjadi dalam beberapa bentuk.

Pelanggaran itu antara lain melarang aktivitas keagamaan, merusak rumah ibadah, diskriminasi atas dasar keyakinan atau agama, intimidasi, dan pemaksaan keyakinan. Sementara itu, Kepala Bagian Mitra Divisi Humas Polri Kombes Pol Awi Setiyono mengatakan, Kepolisian mencatat ada 25 kasus intoleransi yang terjadi sepanjang tahun 2016. Kasus tersebut terjadi dalam bentuk pelanggaran hingga perusakan

rumah ibadah (www.nasional.kompas.com/2017/01/05).

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau. Dengan populasi lebih dari 258 juta jiwa pada tahun 2016, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari 207 juta jiwa. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Meskipun penuh dengan keragaman budaya dan lain sebagainya, Indonesia tetap satu. Sesuai dengan semboyan Bangsa Indonesia, yaitu *Bhineka Tunggal Ika* yang artinya ‘meskipun berbeda-beda tapi tetap satu jua’. Dengan jumlah suku-bangsa kurang lebih 700 suku-bangsa yang tersebar di seluruh penjuru nusantara, dengan tipe kelompok masyarakat yang berbeda, agama yang beraneka ragam, pakaian adat, kesenian, rumah adat, bahasa daerah, adat istiadat, dan bahkan kuliner khas daerah, Indonesia begitu kuat dalam menjaga keharmonisan kehidupan di tengah-tengah heterogenitas. Masyarakat kita adalah masyarakat yang majemuk dengan karakteristik yang begitu unik yaitu kegotong-royongan, tenggang rasa, *tepo seliro*, menghormati orang yang lebih tua, dan lainnya menjadi modal utama bagi masyarakat kita dalam rangka menjaga keharmonisan dan kesatuan.

Indonesia adalah negara yang sangat *bhinneka*. *Kebhinnekaan* Indonesia itu terdapat dalam hampir seluruh aspek kehidupan, salah satunya adalah dalam hal agama. Republik Indonesia mengakui enam agama sebagai agama resmi yakni Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Kong Hu Chu (*Confucianism*), dan juga aliran-aliran kepercayaan lainnya. Agama menjadi salah satu hal yang sensitif bila dikaitkan dengan keharmonisan dan toleransi. Tentu saja, dengan adanya keberagaman masyarakat Indonesia ini seringkali terjadi gesekan-gesekan. Akar dari gesekan-gesekan tersebut adalah perbedaan-

perbedaan paham dalam melihat sesuatu hal, yang mana ini sangat kental terdapat di dalam agama. Toleransi dan intoleransi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh hal itu. Menurut Profesor Jimly Asshiddiqie, Guru Besar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, dalam hubungan antar agama banyak muncul kasus-kasus yang terjadi di masa reformasi ini, seperti pelanggaran terhadap para penganut Ahmadiyah, penganut Syiah, pelarangan terhadap pembangunan gereja, dan lain-lain.

Menurut Komnas HAM, pengaduan tentang peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan begitu tinggi. Pada 2010 Komnas HAM menerima 84 buah pengaduan, yang terdiri dari kasus perusakan, gangguan, dan penyegelan rumah ibadah sebanyak 26 kasus, kekerasan terhadap “aliran sesat” 14 kasus, konflik dan sengketa internal 7 kasus dan yang terkait pelanggaran terhadap Jamaah Ahmadiyah 6 kasus, dan sisanya pelanggaran lain-lain. Pada 2011, pengaduan yang masuk sebanyak 83 kasus dengan 32 kasus terkait gangguan dan penyegelan atas rumah ibadah, 21 kasus terkait Jamaah Ahmadiyah, gangguan dan pelarangan ibadah 13 kasus, dan diskriminasi atas minoritas agama 6 kasus. Pada tahun 2012, tercatat 68 pengaduan dengan perincian; perusakan dan penyegelan rumah ibadah sebanyak 20 kasus, konflik dan sengketa internal 19 kasus, gangguan dan pelarangan ibadah 17 kasus dan diskriminasi minoritas serta penghayat kepercayaan 6 kasus. Pada tahun 2013 Komnas HAM menerima 39 berkas pengaduan. Diskriminasi, pengancaman, dan kekerasan terhadap pemeluk agama sebanyak 21 berkas, penyegelan, perusakan, atau penghalangan pendirian rumah ibadah sebanyak 9 berkas dan penghalangan terhadap ritual pelaksanaan ibadah sebanyak 9 berkas (Asshiddiqie, 2013: 35). Kemudian, lebih lanjut dikatakan bahwa sikap intoleransi sudah merasuk

ke dalam masyarakat termasuk birokrasi. Begitu banyak deretan kasus pelanggaran HAM yang berkaitan dengan intoleransi antarumat beragama. Data-data tersebut merupakan data yang tercatat antara tahun 2010-2013, belum ditambah dengan deretan kasus lainnya dari tahun 2014 hingga tahun 2017 lalu.

Banyak pertanyaan yang muncul di benak kita mengenai ke-*bhineka-tunggal-ika-an* yang didengungkan oleh negara kita. Deretan kasus pelanggaran HAM terkait intoleransi antarumat beragama yang muncul di Indonesia menjadi salah satu bukti belum ditegakkannya rasa toleransi secara keseluruhan. Baru-baru ini, gejolak intoleransi di Indonesia memanas seiring dilaksanakannya aksi yang mengatasnamakan pembelaan agama. Mulai dari aksi damai 411 hingga aksi 212 pada penghujung tahun 2016 dan aksi 212 jilid II di awal tahun 2017 (<http://ksm.ui.ac.id>).

Menurut pengamat politik Al-Chaidar dari Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe Aceh, fenomena ini merupakan bagian dari apa yang disebutnya sebagai “kebangkitan konservatisme”. Hal ini sepertinya merupakan perluasan dari kebangkitan konservatisme yang sedang terjadi di Timur Tengah dan sekitarnya. Ada semangat untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam secara *kaffah* atau total dalam kehidupan sehari-hari. Mereka kerap mewujudkannya dengan cara yang mengejutkan, seperti tindakan *sweeping* atau razia berdasarkan fatwa semata tanpa mengindahkan prinsip hidup berdampingan secara damai dengan masyarakat lain. Atau lewat gerakan purifikasi, dengan sama sekali menolak nilai-nilai, infrastruktur atau produk yang mereka anggap menyimpang. Itulah makanya ada gerakan pendirian toko 212 atau bank 212. Kelompok konservatif ini memiliki kerangka nilai atau tata aturan yang dipersepsikan sebagai hal yang tidak selaras dengan modernisasi atau Barat (www.voaindonesia.com/2016/12/9).

Dapat disimpulkan beberapa faktor yang memengaruhi intoleransi yaitu: pene-gakan hukum yang lemah, pemerintah yang hanya memihak mayoritas, dan masya-rakat yang tercipta dari kondisi keluarga dan pendidikan yang kurang menekankan pentingnya toleransi. Oleh karena itu masyarakat semestinya mulai belajar tentang toleransi, pendidikan toleransi harusnya sudah ditekankan sejak dini mulai dari lingkungan keluarga karena keluarga adalah agen pertama pendidikan. pendidikan toleransi juga harus ditekankan di lembaga pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal. Bibicara tentang toleransi bisa belajar dari pondok pesantren gontor ponorogo, ini dikarnakan Pondok Gontor diibarataan sebagai miniatur Indonesia yang terdapat ribuan santri dengan berbeda latar belakang serta ras. Namun dengan perbedaan tersebut, seluruh santri di Gontor bisa saling menghargai. Oleh karena itu yang menjadi kajian dalam tulisan ini adalah bagaimana praktek toleransi yang terdapat dalam Pondok Pesantren Gontor Ponorogo sebagai pembelajaran toleransi di masyarakat Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Profil Pondok Pesantren Gontor Ponorogo

Pondok Modern Darussalam Gontor bermula pada abad ke-18. Pondok Tegalsari sebagai cikal bakal Pondok Modern Darussalam Gontor didirikan oleh Kyai Ageng Hasan Bashari. Ribuan santri berduyun-duyun menuntut ilmu di pondok ini. Saat pondok tersebut dipimpin oleh Kyai Khalifah, terdapat seorang santri yang sangat menonjol dalam berbagai bidang. Namanya Sulaiman Jamaluddin, putera Panghulu Jamaluddin dan cucu Pangeran Hadiraja, Sultan Kasepuhan Cirebon. Ia sangat dekat dengan Kyainya dan Kyai pun sayang padanya. Maka setelah santri Sultan Jamaluddin dirasa telah memperoleh ilmu yang cukup, ia dinikahkan

dengan putri Kyai dan diberi kepercayaan untuk mendirikan pesantren sendiri di desa Gontor.

Gontor adalah sebuah tempat yang terletak lebih kurang 3 km sebelah timur Tegalsari dan 11 km ke arah tenggara dari kota Ponorogo. Pada saat itu, Gontor masih merupakan kawasan hutan yang belum banyak didatangi orang. Bahkan hutan ini dikenal sebagai tempat persembunyian para perampok, penjahat, penyamun bahkan pemabuk.

Dengan bekal awal 40 santri, Pondok Gontor yang didirikan oleh Kyai Sulaiman Jamaluddin ini terus berkembang dengan pesat, khususnya ketika dipimpin oleh putera beliau yang bernama Kyai Anom Besari. Ketika Kyai Anom Besari wafat, Pondok diteruskan oleh generasi ketiga dari pendiri Gontor Lama dengan pimpinan Kyai Santoso Anom Besari.

Setelah perjalanan panjang tersebut, tibalah masa bagi generasi keempat. Tiga dari tujuh putra-putri Kyai Santoso Anom Besari menuntut ilmu ke berbagai lembaga pendidikan dan pesantren, dan kemudian kembali ke Gontor untuk meningkatkan mutu pendidikan di Pondok Gontor. Mereka adalah; KH. Ahmad Sahal (1901-1977), KH. Zainuddin Fanani (1908-1967), KH. Imam Zarkasyi (1910-1985).

Mereka memperbaharui sistem pen-didikan di Gontor dan mendirikan Pondok Modern Darussalam Gontor pada tanggal 20 September 1926 bertepatan dengan 12 Rabiul Awwal 1345, dalam peringatan Maulid Nabi. Pada saat itu, jenjang pendidikan dasar dimulai dengan nama *Tarbiyatul Athfal*. Kemudian, pada 19 Desember 1936 yang bertepatan dengan 5 Syawwal 1355, didirikanlah *Kulliyatu-l-Muallimin al-Islamiyah*, yang program pendidikannya diselenggarakan selama enam tahun, setingkat dengan jenjang pendidikan menengah.

Dalam perjalanannya, sebuah perguruan tinggi bernama Perguruan Tinggi Darussalam

(PTD) didirikan pada 17 November 1963 yang bertepatan dengan 1 Rajab 1383. Nama PTD ini kemudian berganti menjadi Institut Pendidikan Darussalam (IPD), yang selanjutnya berganti menjadi Institut Studi Islam Darussalam (ISID). Saat ini ISID memiliki tiga Fakultas: Fakultas Tarbiyah dengan jurusan Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ushuluddin dengan jurusan Perbandingan Agama, dan Akidah dan Filsafat, dan Fakultas Syariah dengan jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, dan jurusan Manajemen Lembaga Keuangan Islam. Sejak tahun 1996 ISID telah memiliki kampus sendiri di Demangan, Siman, Ponorogo. Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo saat ini dipimpin oleh: KH. Dr. Abdullah Syukri Zarkasyi, KH. Hasan Abdullah Sahal, dan KH. Syamsul Hadi Abdan (<https://www.gontor.ac.id/latar-belakang>).

Visi Pondok Pesantren Gontor adalah Sebagai lembaga pendidikan pencetak kader-kader pemimpin umat, menjadi tempat ibadah talab al-'ilmi; dan menjadi sumber pengetahuan Islam, bahasa al-Qur'an, dan ilmu pengetahuan umum, dengan tetap berjiwa pesantren. Dengan Misi: (1) Membentuk generasi yang unggul menuju terbentuknya khaira ummah. (2) Mendidik dan mengembangkan generasi mukmin-muslim yang berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikiran bebas, serta berkhidmat kepada masyarakat. Mengajarkan ilmu pengetahuan agama dan umum secara seimbang menuju terbentuknya ulama yang intelek. (3) Mewujudkan warga negara yang berkepribadian Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.

Sedangkan tujuan berdirinya Pondok Pesantren Gontor adalah; (1) Terwujudnya generasi yang unggul menuju terbentuknya khaira ummah. (2) Terbentuknya generasi mukmin-muslim yang berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikiran bebas, serta berkhidmat kepada masyarakat. (3) Lahirnya ulama intelek

yang memiliki keseimbangan dzikir dan pikir. (4) Terwujudnya warga negara yang berkepribadian Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Dengan Motto Berbudi tinggi, Berbadan sehat, Berpengetahuan luas dan Berpikiran bebas (<https://www.gontor.ac.id/selayang-pandang>).

Para Pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor, pada awal pembangunan Pondok Gontor Baru telah mengkaji berbagai lembaga pendidikan terkenal dan maju di luar negeri, khususnya yang sesuai dengan sistem pondok pesantren. Di Mesir terdapat Universitas al-Azhar yang terkenal dengan keabadiannya. Al-azhar bermula dari sebuah masjid yang didirikan oleh Penguasa Mesir dari Daulah Fatimiyah. Universitas ini telah hidup ratusan tahun dan telah memiliki harta wakaf yang mampu memberi beasiswa kepada siswa dari seluruh dunia.

Di Mauritania terdapat Pondok Syanggit. Lembaga pendidikan ini harum namanya berkat kedermawanan dan keikhlasan para pengasuhnya. Syanggit adalah lembaga pendidikan yang dikelola dengan jiwa keikhlasan; para pengasuh mendidik murid-murid siang-malam serta menanggung seluruh kebutuhan santri. Di India terdapat Universitas Muslim Aligarh, sebuah lembaga pendidikan modern yang membekali mahasiswanya dengan ilmu pengetahuan umum dan agama serta menjadi pelopor revival of Islam. Di India juga terdapat perguruan Santiniketan, didirikan oleh Rabindranath Tagore, seorang filosof Hindu. Perguruan yang dikenal dengan kedamaiannya ini berlokasi di kawasan hutan, serba sederhana dan telah mampu mengajar dunia. Keempat lembaga pendidikan tersebut menjadi idaman para pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor, karena itu mereka hendak mendirikan lembaga pendidikan yang merupakan sintesa dari empat lembaga tersebut (<https://www.gontor.ac.id/gagasan-dan-cita-cita>).

Sistem Pondok Modern Gontor mempunyai sifat, bentuk dan isi yang khas. Sifatnya; sebagai sumber hidup keagamaan yang tetap harus dipertahankan. Sedangkan bentuknya mengalami perubahan, modifikasi, inovasi, dengan tidak meninggalkan hidup kekeluargaan yang ada di dalamnya.

Demikian pula di Pondok Modern Gontor, sebagai tempat kediaman guru dan murid, merupakan sifat perguruan kepribadian bangsa Indonesia pada zaman dahulu, di mana guru-guru dan murid-murid selalu berdekatan, bersama-sama mengatur rumah, bersama-sama mengatur kebun dengan memelihara segala tanaman yang ada di dalamnya untuk dapat memajukan hidup keluarga, yang berarti menyempurnakan hidup manusia pula.

Dengan sistem pondok inilah, menurut keyakinan, akan banyak dicapai hasil dalam penyelenggaraan pendidikan dari pada sistem lainnya. Sedang isinya, dapat dimengerti, bahwa di dalam hasil ini pondok harus terus berusaha untuk selalu memperbaiki dan menambah segala isinya, membuang yang tidak perlu dan memasukkan perbagai isi baru, agar dengan demikian dapat memperkembang dan memperkaya hidup dan penghidupan, agar santri-santrinya yang akan merupakan penyebar agama mendapatkan senjata di dalam masyarakat yang makin maju ini (Tim Penyusun, 1960: 286-287).

2. Islam dan Toleransi

Islam mengakui adanya pluralitas suku, kultur dan agama sebagai *sunnatullah* (QS. Hud: 118-119). Namun Islam tidak mengakui pluralisme yang memandang bahwa semua agama sama. Hal itu disebabkan adanya perbedaan fundamental secara teologis yang tidak bisa ditawar. Yahudi mengakui Yahweh sebagai Tuhan khusus untuk golongan mereka; Kristen mengimani satu Tuhan namun memiliki tiga unsur; Tuhan Bapak, Tuhan Anak, dan Ruh Kudus, atau dikenal dengan Trinitas. Sedangkan agama-agama

nonsemitik, seperti Hindu, Majusi, Taoisme, dan lainnya beriman kepada banyak Tuhan atau golongan yang sering disebut politeistik.

Konsepsi Tuhan agama-agama tersebut tentunya berbeda dengan Islam yang berakidah tauhid yang mengakui Allah sebagai Tuhan (*laa ilaha illa Allah*), bahkan Islam menyalahkan orang-orang Ahli Kitab karena telah menyembah selain Allah, dan melakukan penyelewengan terhadap kitab-kitab yang diturunkan

kepada mereka.

Namun demikian, hakikat manusia dalam perspektif Islam adalah makhluk yang sempurna (al-Tin: 4), diperintahkan untuk beribadah (al-Dzariyat: 56), dan secara natural dan fitrahnya adalah suci, sebagaimana disebutkan dalam hadis: “*Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah), orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani dan Majusi*” (HR. al-Muttafaq ‘Alaihi).

Dari sudut pandang ini, orang-orang non-Muslim dalam perspektif Islam adalah manusia yang mempunyai potensi untuk mencapai tingkat keagamaan yang benar, karena semenjak kelahirannya manusia telah diberi Allah kesadaran beragama (*sensus numinis*) yaitu agama fitrah atau disebut sebagai agama hanif (al-Rum: 30). Cara pandang Islam terhadap manusia tersebut mencerminkan sikap toleransi Islam, yang berbeda dengan ajaran Yahudi yang rasial dan keyakinan Kristen yang menganggap bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan berdosa, sehingga untuk mensucikannya seorang manusia harus dibaptis dan masuk Kristen karena Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang menebus dosa manusia.

Keberagaman manusia dalam beragama disebabkan oleh faktor sejarah dan lingkungan yang berevolusi dari fitrahnya (agama Islam). Walaupun secara kawaniyah (ontologis) keberagaman agama tersebut berasal dari Allah, bukan berarti keberagaman agama-agama selain Islam itu bisa dibenarkan, karena- sebagaimana

penjelasan Ibnu Taymiyah- kehendak Allah mencakup kepada; *Iradah kawniyah*, yaitu kehendak ontologis dalam setiap eksistensi kehidupan sebagai keseimbangan; ada baik dan buruk, cahaya dan gelap, laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya. Dan *irâdah dîniyah*, sebagai legislator antara yang *haqq* dan yang *bâthil*. Maka ada ciptaan Allah yang Allah menghendaknya secara *kawniyah* dan *diniyah*, seperti; kebaikan, kebenaran, iman, dan segala sesuatu yang dicintai yang termaktub dalam syari'at-Nya. Dan ada juga ciptaanNya yang dikehendaki secara *kawniyah* namun tidak dikehendaki secara *diniyah*; seperti kufur, kejelekan, kebathilan dan lain sebagainya (Taqiyuddin, 1426: 134).

Secara Nash Jika pluralisme agama mengakui semua agama benar sebagai prinsip toleransi. Islam hanya mengklaim Islam sebagai satu-satunya kebenaran, namun demikian Islam menjunjung tinggi toleransi (*tasâmuh*). Bahkan toleransi merupakan karakteristik Islam itu sendiri sebagai *al-hanifiyah al-samhah* (Hanbal, 116).

Islam merupakan agama yang eksklusif namun Islam mengakui bahwa namun Islam tidak memaksakan kehendaknya agar penganut agama lain untuk mengikutinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat” (al-Baqarah: 256). Juga disebutkan: “Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?” (Yunus: 99). Dan berdakwah dengan cara yang baik dan beradab: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik...” (al-Nahl: 125). Islam juga memerintahkan kepada umatnya untuk bersikap baik kepada seluruh manusia walau kafir sekalipun, dengan syarat mereka tidak memerangi Islam: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu

karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.” (al-Mumtahanah: 8).

Dalam berdebat dengan agama lain, khususnya Ahli Kitab, Islam juga diperintahkan untuk berdebat dengan cara yang lebih baik (al-Nahl: 125). Bahkan dalam Islam, Ahli Kitab mendapatkan keistimewaan, yaitu; dihalalkan sembelihan dan makanan mereka serta diperbolehkan menikahi wanita mereka (al-Ma'idah: 5). Mengomentari itu, al-Qardhawi menyatakan bahwa sesungguhnya hal itu mencerminkan sikap toleransi yang luar biasa dari pihak Islam dimana seorang Muslim diperbolehkan menjadikan seorang wanita non-Muslim (kitabiyah) sebagai istrinya (Qardhawi, www. Al-Mostafa.com).

Maka dari itu, secara konseptual Islam tidak hanya sekedar toleransi. Menurut Dr. Syauqi Abu Khalil, secara Nash, di dalam Islam terkandung *al-shafh* (al-Baqarah: 109, al-Nur: 22) sikap untuk memaafkan kepada orang-orang non-Muslim dan juga *ihsân* atau kebaikan kepada seluruh manusia (al-Baqarah: 83, 195) (Syauqi, 1988: 42-43). Maka dari itu, toleransi Islam sebagaimana penuturan Hikmat bin Basyir bin yasin lebih dari sekedar toleransi atau kemauan untuk menerima ketidaksepakatan yang *genuine* tapi di dalamnya juga terkandung *ihsân* (kebaikan) kepada orang lain yang membawa kecintaan kepada seseorang yang diberikan kepadanya kebaikan, dan mengarahkan pada kecintaan, keharmonisan, serta menjauhkan manusia dari kekerasan dan alienasi (Hikmat, 1992: 2).

Dalam Sejarah Peradaban Islam Toleransi dalam Islam tidak hanya tertulis secara Nash, tapi telah diterapkan dalam kehidupan Umat Islam dalam bermasyarakat dengan orang-orang non-Muslim. Pada awal Islam, suku-suku di Jazirah Arab masuk Islam secara sukarela, karena argumentasi, kagum pada pribadi Nabi SAW, serta konsep tauhid dalam Islam dan lain sebagainya.

Dalam sejarahnya, Nabi Muhammad SAW telah meletakkan dasar-dasar hubungan antara kaum muslimin dengan orang-orang non-Muslim yang belakangan dikenal dengan *Mitsâq Madinah*. Dalam perjanjian tersebut, tidak hanya orang-orang Yahudi, Ahli Kitab dari Kristen juga dianggap sebagai satu umat: *“Orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan orang-orang mukmin. Bagi orang-orang yahudi adalah agama mereka dan bagi orang-orang mukmin agama mereka, termasuk pengikut mereka dan diri mereka sendiri. Hal ini berlaku bagi orang-orang yahudi selain Bani Auf”*.

Orang-orang non-Muslim yang hidup dalam perjanjian itu disebut Ahli Dzimmah dan mendapat hak-hak dan kewajiban, seperti Umat Islam kecuali dalam perkara-perkara tertentu dengan syarat membayar *jizyah* (Tahqiq, 1425: 395). Bahkan Nabi SAW memberikan perlindungan kepada mereka dengan ungkapan: *“Barang siapa yang menyakiti Ahli Dzimmah maka akulah lawannya.”*

Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Ghair al-Muslimîn fî al-Mujtama’ al-Islâmî*, menjelaskan bahwa hak-hak non-Muslim Ahli Dzimmah mencakup kepada: hak perlindungan dari serangan musuh, harta, jiwa, kehormatan *hattajaminan* hari tua. Selain itu, mereka juga diberi kebebasan dalam beragama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta hak untuk mendirikan sistem peradilan khusus atau otonomi untuk menyelesaikan kasus-kasus khusus mereka (seperti pernikahan, urusan keluarga dan lain sebagainya) sesuai dengan konsep dan sistem yang diyakini (Qaradhawi, 2005: 8-11). Namun dalam menjalankan hak-hak tersebut harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang menyangkut kemaslahatan bersama, dan tidak mengganggu ketertiban umum dan menghormati nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh agama mayoritas. Tata cara tersebut terekam jelas dalam perjanjian penduduk Kristen Jazirah kepada Umar

bin Khattab, dimana mereka tidak boleh melakukan secara terang-terangan hal-hal yang dalam agama mereka dihalalkan namun dalam Islam diharamkan, seperti memelihara babi apabila bertetangga dengan Islam, dan tidak menjual khamar dan meminumnya ditempat-tempat umum, dan lain sebagainya (Ibnu Qayyim, 1997: 1159).

Toleransi Islam juga diterapkan dalam peperangan. Ketika Abu Bakar memerintahkan umat Islam untuk melawan pemberontak, beliau berpesan kepada Yazid bin Abi Sufyan untuk: jangan membunuh seorang wanita, anak kecil, orang tua renta, jangan memotong pohon, membinasakannya, apalagi membakarnya, jangan menyembunyikan barang rampasan perang sedikitpun dan jangan jadi pengecut.

Dalam penaklukan, Islam jugamenjunjung tinggi toleransi. Ketika Umar bin Khattab berhasil menaklukan Elia (Yerusalem) tanpa kekerasan, Umar tidak merusak gereja-gereja mereka, dan memberikan jaminan perlindungan, sebagaimana termaktub dalam perjanjian Elia: *“Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi maha penyayang; ini adalah pemberian hamba Allah amirul Mu’minin Umar bin Khattab jaminan keamanan dan perlindungan kepada penduduk Iliya’; perlindungan dan keamanan terhadap jiwa, harta, gereja-gereja, salib-salib, dan semua yang berkaitan dengan gereja mereka. Gereja mereka tidak boleh dirusak, termasuk area gereja, salib-salib mereka, dan harta-harta mereka, dan tidak boleh memaksa meninggalkan agama mereka dan tidak boleh dianiaya. Orang Yahudi tidak diperkenankan tinggal di Elia dan bagi orang-orang Iliya’ memberikan jizyah sebagaimana orang-orang Madinah...”* (al-Thabari, 1407: 449).

Pada masa kekuasaan Islam, orang-orang non-Muslim dari Ahli Kitab, Majusi, Hindu, Budha hidup berdampingan secara damai selama berabad-abad. Ketika Islam menduduki Spanyol (8 M), Islam menciptakan kestabilan dan keamanan di sana dari kekacauan sosial, kerusakan dan fitnah golongan. Orang-orang

dari seluruh ras, dan agama berinteraksi dalam keberagaman dengan damai. Flasco Abianz seorang penulis Spanyol menuturkan bahwa ketika Islam menduduki Spanyol (8-15 M) telah berdiri dan berkembang sebuah peradaban yang indah dan kaya di Eropa. Namun, ketika kekuasaan Islam berakhir, Kristen melancarkan serangan kepada Spanyol untuk membersihkannya dari pengaruh Islam. Orang-orang Islam diusir dengan biadab.

Di Jerusalem, pada masa kekuasaan Sultan Sulaiman Agung (1520-1566), Kaum Yahudi ditampung dan dilindungi di wilayah Turki Usmani, bahkan di antara mereka ada yang memegang jabatan di pemerintahan, sesuatu yang mustahil didapati di Eropa. David dei Rossi mencatat bahwa Orang-orang Yahudi di sana layaknya seperti di negeri sendiri.

Menurut Karen Amstrong- sebagaimana dikutip oleh Adian Husaini bahwa Islam memiliki tradisi toleransi beragama yang menata hubungan dengan kaum non-Muslim. Tidak persekusi kaum kafir dalam Islam kepada non-Muslim seperti yang terjadi di dalam Kristen di Eropa. Islam memang menyebut non-Muslim dengan sebutan kafir tetapi Islam tidak memerintahkan untuk memaksakan mereka untuk masuk Islam apalagi mengeksekusi mereka.

Intinya, sebagaimana penuturan Qardhawi, peradaban Islam adalah tradisi toleransi yang luhur terhadap orang-orang non-Muslim yang merupakan sebuah realitas yang dapat ditelusuri melalui Nash wahyu; al-Qur'an dan al-Hadis, dan sejarah peradaban yang ditorehkan para khulafa' rasyidin, kemudian umawiyah, 'Abbasiyah, Utsmaniyyin, dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya; yang di dalam *daar Islam*, terdapat masjid-masjid, gereja-gereja, sinagog; yang di dalamnya dapat terdengar suara adzan dan suara lonceng gereja. Orang-orang non-Muslim minoritas dengan jaminan perlindungan dan keamanan dan diberi

kebebasan untuk mengamalkan ritual keagamaan mereka (Ryandi, 2013: 267).

Al-Qur'an menjelaskan bahwa pluralitas adalah salah satu kenyataan objektif komunitas umat manusia, sejenis hukum Allah atau *Sunnah Allah*, dan bahwa hanya Allah yang tahu dan dapat menjelaskan, di hari akhir nanti, mengapa manusia berbeda satu dari yang lain, dan mengapa jalan manusia berbeda-beda dalam beragama. Dalam al-Qura'an disebutkan, yang artinya: "Untuk masing-masing dari kamu (umat manusia) telah kami tetapkan Hukum (Syari'ah) dan jalan hidup (*minhaj*). Jika Tuhan menghendaki, maka tentulah Dia jadikan kamu sekalian umat yang tunggal (monolitik). Namun Dia jadikan kamu sekalian berkenaan dengan hal-hal yang telah dikaruniakan kepada kamu. Maka berlombalah kamu sekalian untuk berbagai kebajikan. Kepada Allah-lah tempat kalian semua kembali; maka Dia akan menjelaskan kepadamu sekalian tentang perkara yang pernah kamu perselisihkan" (QS. 5: 48).

Dalam kaitan langsung dengan prinsip inilah Allah, di dalam Alquran, menegur keras Nabi Muhammad SAW ketika dia menunjukkan keinginan dan kesediaan yang menggebu untuk memaksa manusia menerima dan mengikuti ajaran yang disampaikan, sebagai berikut: "Jika Tuhanmu menghendaki, maka tentunya manusia yang ada di muka bumi ini akan beriman. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia, di luar kesediaan mereka sendiri? (QS. 10: 99).

Demikianlah beberapa prinsip dasar Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah pluralisme dan toleransi. Paling tidak, dalam dataran konseptual, Al-Qur'an telah memberi resep atau arahan-arahan yang sangat diperlukan bagi manusia Muslim untuk memecahkan masalah kemanusiaan universal, yaitu realitas pluralitas keberagamaan manusia dan menuntut supaya bersikap toleransi terhadap kenyataan tersebut demi tercapainya perdamaian di muka bumi. Karena Islam menilai bahwa syarat untuk

membuat keharmonisan adalah pengakuan terhadap komponen-komponen yang secara alamiah berbeda.

Selain itu, era sekarang adalah era multikulturalisme dan pluralisme, yang dimana seluruh masyarakat dengan segala unsurnya dituntut untuk saling tergantung dan menanggung nasib secara bersama-sama demi terciptanya perdamaian abadi. Salah satu bagian penting dari konsekuensi tata kehidupan global yang ditandai kemajemukan etnis, budaya, dan agama tersebut, adalah membangun dan menumbuhkan kembali teologi pluralisme dalam masyarakat (Maksum, 2015: 96).

3. Toleransi di Pondok Pondok Pesantren Gontor Ponorogo

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau. Dengan populasi lebih dari 258 juta jiwa pada tahun 2016, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari 207 juta jiwa. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Meskipun penuh dengan keragaman budaya dan lain sebagainya, Indonesia tetap satu. Sesuai dengan semboyan Bangsa Indonesia, yaitu *Bhineka Tunggal Ika* yang artinya 'meskipun berbeda-beda tapi tetap satu jua'. Dengan jumlah suku-bangsa kurang lebih 700 suku-bangsa yang tersebar di seluruh penjuru nusantara, dengan tipe kelompok masyarakat yang berbeda, agama yang beraneka ragam, pakaian adat, kesenian, rumah adat, bahasa daerah, adat istiadat, dan bahkan kuliner khas daerah, Indonesia begitu kuat dalam menjaga keharmonisan kehidupan di tengah-tengah heterogenitas. Masyarakat kita adalah masyarakat yang majemuk dengan karakteristik yang begitu unik yaitu kegotong-royongan, tenggang rasa, *tepo seliro*, menghormati orang yang lebih tua, dan lainnya menjadi modal utama bagi masyarakat kita dalam rangka menjaga

keharmonisan dan kesatuan (<http://ksm.ui.ac.id>).

Dalam rangka menjaga kebhinekaan yang menjadi khasanah bangsa, maka rakyat Indonesia semetinya menanamkan sikap toleransi. Apabila masyarakat sudah terbentuk menjadi masyarakat yang toleran, tentu pemerintah akan membuat kebijakan berkeadilan yang tidak hanya memihak satu pihak. Dengan demikian hukum akan tegak karena kesadaran masyarakatnya.

Berbicara tentang toleransi kita bisa belajar dari potret Pondok Pesantren Gontor Ponorogo. Gagasan untuk membangun Gontor menjadi pondok pesantren yang menanamkan nilai-nilai toleransi berawal dari situasi sosial dan politik bangsa Indonesia berpengaruh pula pada pendidikan; banyak lembaga pendidikan yang didirikan oleh partai-partai dan golongan-golongan politik. Dalam lembaga pendidikan itu ditanamkan pelajaran tentang partai atau golongan. Sehingga timbul fanatisme golongan. Sedangkan para pemimpinnya terpecah karena masuknya benih-benih perpecahan yang disebarkan oleh penjajah. Maka lembaga pendidikan itu harus dibebaskan dari kepentingan golongan atau partai politik tertentu, dan "berdiri di atas dan untuk semua golongan".

Tidak dapat disangkal bahwa ummat Islam Indonesia, juga ummat Islam di seluruh dunia, terbagi ke dalam berbagai suku, bangsa, negara, dan bahasa; mereka juga terbagi ke dalam aliran-aliran paham agama; mereka juga terbagi-bagi ke dalam kelompok-kelompok organisasi dan gerakan baik dalam bidang politik, sosial, dakwah, ekonomi, maupun yang lain. Kenyataan ini menunjukkan adanya faktor pengkategorian yang beragam. Tetapi, harus tetap disadari bahwa kategori-kategori tersebut tidak bersifat mutlak. Karena itu, semua dasar klasifikasi tersebut tidak boleh dijadikan dasar pengkotak-kotakan ummat yang menjurus kepada timbulnya pertentangan dan perpecahan di antara

mereka. Maka lembaga pendidikan harus berusaha menanamkan kesadaran mengenai hal ini, serta mengajarkan bahwa faktor pengkategori yang sebenarnya adalah Islam itu sendiri; ummat Islam seluruhnya adalah bersaudara dalam satu ukhuwwah diniyyah.

Bangsa ini terus berkembang dan semua itu menjadi perhatian, pengamatan, dan pemikiran para pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor. Secara bertahap sistem pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor berjalan dengan berbagai percobaan pengembangan dari waktu ke waktu. Ketiga pendiri yang memiliki latarbelakang pendidikan yang berbeda itu saling mengisi dan melengkapi, sehingga Balai Pendidikan Pondok Modern Darussalam Gontor menjadi seperti sekarang ini. Namun semua yang ada saat ini belum mencerminkan seluruh gagasan dan cita-cita para pendiri Gontor. Karena itu adalah tugas generasi penerus untuk memelihara, mengembangkan dan memajukan lembaga pendidikan ini demi tercapainya cita-cita para pendirinya (<https://www.gontor.ac.id/gagasan-dan-cita-cita>).

Pendidikan toleransi harusnya sudah ditekankan sejak dini mulai dari lingkungan keluarga karena keluarga adalah agen pertama pendidikan kita. Kedua, pendidikan toleransi juga harus ditekankan di pendidikan formal dan non formal termasuk pondok pesantren. Sistem pendidikan harus disusun agar dapat menerapkan rasa toleransi sejak dini.

Dalam konteks pondok Gontor, pendidikan berwawasan toleransi sesungguhnya telah menjadi pendidikan dasar yang tidak hanya diajarkan dalam pengajar formal di kelas saja. Tapi juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari santri. Pendidikan formal toleransi diwujudkan dalam bentuk pengajaran materi keindonesiaan atau kewarganegaraan yang telah dikurikulumkan. Sistem pengajaran di pondok Gontor yang didominasi bahasa asing (Arab dan Inggris) sebagai pengantar,

tidak melunturkan semangat pendidikan toleransi anak didik (santri). Karena materi ini ditempatkan sebagai materi primer dan harus diajarkan dengan medium bahasa Indonesia pula.

Dalam bidang non formal, pesantren dengan kelebihan pendidikan intens 24 jam-nya, memiliki banyak waktu untuk menyisipkan aneka pendidikan. Salah satunya wawasan toleransi. Pola umum yang nyaris diberlakukan di berbagai pondok modern adalah sistem pendidikan toleransi dan multikultur yang menyatu dalam aturan dan disiplin pondok. Salah satunya dalam urusan penempatan pemondokan (asrama) santri. Di pondok Gontor, tidak diberlakukan penempatan permanen santri di sebuah asrama. Dalam arti, seluruh santri harus mengalami perpindahan sistematis ke asrama lain, guna menumbuhkan jiwa sosial mereka terhadap keragaman.

Dalam hal ini Riza seorang alumni pesantren Gontor mengatakan bahwa: “ Untuk menumbuhkan sikap toleransi dan pemahaman terhadap budaya lain, dalam satu kamar ditempatkan para santri yang berasal dari berbagai daerah, baik Jawa, luar Jawa, dan bahkan santri dari luar negeri. Penempatan santri dalam satu kamar ini tidak permanen. Pondok Modern Gontor menetapkan regulasi agar setiap tahun santri diharuskan mengalami perpindahan asrama. Setiap satu semester mereka juga akan mengalami perpindahan antarkamar dalam asrama yang mereka huni. Hal ini ditujukan untuk memberi variasi kehidupan bagi para santri, juga menuntun mereka memperluas pergaulan dan membuka wawasan mereka terhadap aneka tradisi dan budaya santri-santri lainnya. Penempatan santri tidak didasarkan pada daerah asal atau suku. Bahkan, penempatan telah diatur sedemikian rupa oleh pengasuh pondok, dan secara maksimal diupayakan kecilnya kemungkinan santri-santri dari daerah tertentu menempati sebuah kamar yang sama. Dengan demikian antara santri tidak

berpikir primordial dan hanya mengenal teman-temannya yang satu daerah saja. Dengan sistem ini para santri mempunyai wawasan multikultural dan toleransi melalui pengalaman nyata sehari-hari (Riza, 2017).”

Ketentuan yang diberlakukan, satu kamar maksimal tidak boleh dihuni oleh tiga orang lebih santri asal satu daerah. Menurut KH Abdullah Syukri Zarkasyi, upaya ini untuk melebur semangat kedaerahan mereka ke dalam semangat yang lebih universal. Di samping itu, agar santri juga dapat belajar kehidupan bermasyarakat yang lebih luas, berskala nasional, bahkan internasional bersama para santri mancanegara (Zarkasyi, 2005: 125). Namun, penerapan pola pendidikan ini, menurut Syukri Zarkasyi, tidak berarti menafikan unsur daerah. Karena unsur kedaerahan telah diakomodir dalam kegiatan daerah yang disebut “konsulat”, yang ketentuan organisasi dan kegiatannya telah diatur, khususnya untuk diarahkan menolaknya menjadi sumber fanatisme kedaerahan.

Pendidikan toleransi lainnya dalam intensitas pendidikan pondok Gontor adalah diberlakukannya aturan mengikat yang melarang santri berbicara menggunakan bahasa daerah. Selain bahasa utama Arab dan Inggris, ketika masuk lingkungan pondok santri hanya dibolehkan berbicara bahasa Indonesia dalam beberapa kesempatan dan kepentingan. Pendisiplinan santri dalam pendidikan multikulturalisme lewat bahasa ini sangat ketat. Bagi santri yang melanggarnya akan diberi hukuman bervariasi yang edukatif. Pendidikan toleransi atas perbedaan juga kental diajarkan dalam sistem pendidikan pondok modern. Keberagaman pemikiran dan ijtihad diajarkan kepada santri tanpa pemaksaan, atau mengajarkan mereka untuk memaksakan ide. Sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat sangat diunggulkan sistem pendidikan pondok Gontor.

Dengan sistem Mu'allimin yang didukung intensitas pendidikan 24 jam, beban

pengejawantahan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), seperti disyaratkan dalam pendidikan formal, dapat dilalui pondok modern. Pada KBK, kendala utamanya adalah keterbatasan waktu ajar untuk memberi pemahaman penuh sebuah materi kepada siswa. Dengan sistem Mu'allimin, masa pendidikan luar kelas di pondok pesantren cenderung lebih banyak dibanding waktu formal pembelajaran di dalam kelas.

Keterbatasan masa pengajaran di kelas ini pun dapat tertanggulangi pondok pesantren dengan adanya banyak waktu luang yang dapat dimanfaatkan para guru untuk melengkapi pengajaran kepada santri. Pola ini sangat mengefisiensikan waktu dan membuat pengajaran menjadi efektif. Ditambah lagi dengan arus utama sistem pendidikan di pondok modern yang tidak mengenal dikotomi pendidikan ekstrakurikuler dan intrakurikuler (Zarkasyi, 2005: 155).

Keutamaan pendidikan toleransi di pondok Gontor juga tercermin dari muatan atau isi kurikulum yang kentara mengajarkan wawasan santri akan keragaman keyakinan. Dalam kelompok bidang studi *Dirasah Islamiyah*, sebagai contoh, diajarkan materi khusus *Muqaranat al-Adyan* (Perbandingan Agama) yang konten luasnya memaparkan sejarah, doktrin, isme, fenomena dan dinamika keagamaan di dunia. Materi ini sangat substansial dalam pendidikan multikulturalisme, karena santri diberi wawasan berbagai perbedaan mendasar keyakinan agama mereka (Islam) dengan agama-agama lain di dunia. Materi ini sangat potensial membangun kesadaran toleransi keragaman keyakinan yang akan para santri temui saat hidup bermasyarakat kelak.

Dalam pendidikan sikap multikulturalistik, pondok Gontor menerapkan pemberian wawasan rutin melalui visualisasi aneka kultur dan budaya para santrinya. Setiap tahun ajaran baru digelar seremoni besar *Khutbatul 'Arsy* dengan salah satu materi acara berupa pertunjukan aneka kreasi dan

keaktivitas pelangi budaya semua elemen santri, berdasarkan kategori “konsulat” (kedaerahan). Dalam acara ini dilombakan demonstrasi keunikan khazanah dan budaya tempat domisili asal santri. Semua santri diwajibkan terlibat dalam kegiatan ini. Kegiatan pembuka tahun ajaran baru ini ditujukan untuk menjadi pencerah awal dan wawasan kebhinekaan budaya dalam lingkungan yang akan mereka huni (Maksum, 2015: 102).

Nama besar pondok pesantren gontor sebagai tempat belajar nilai toleransi telah tersebar di dunia Internasional, hal ini dibuktikan dengan adanya kunjungan Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Dubes Inggris ini mengunjungi Pondok Gontor untuk belajar mengenai toleransi dan melihat aktivitas santri di pondok itu. Selain itu, ia juga ingin belajar bagaimana cara Indonesia dalam mengendalikan ekstremisme.

Malik menuturkan kunjungannya ke Gontor untuk belajar toleransi dan pengendalian ekstremisme. Dubes Inggris menganggap Indonesia berhasil untuk mengendalikan gerakan ekstremisme. Indonesia berhasil mengendalikan kelompok ekstrem dibandingkan negara lain. Untuk itu Malik berkunjung ke pondok pesantren untuk mengkaji bagaimana dan kenapa Indonesia bisa berhasil dalam hal ini. Malik mengungkapkan pihaknya juga tertarik mempelajari bagaimana membuat hubungan lembaga Islam di Inggris menjadi erat seperti di Indonesia. Saat ini hampir 50 persen penduduk Inggris beragama Islam dan 10 persen penduduk di London beragama Islam. Sebagian besar muslim di Inggris berasal dari negara yang mengalami konflik. Indonesia memiliki rekam jejak yang baik sebagai negara yang toleran dan beragam. Peran sekolah dan universitas di Indonesia sangat penting dalam mendukung toleransi berdasarkan Pancasila. Ada banyak hal yang bisa dipelajari oleh Inggris tentang

pengalaman Indonesia. Ada banyak pula yang bisa kita bagi sebagai negara demokrasi dan beragam.

Pembantu Rektor I Universitas Darussalam Gontor, Hamid Fahmi Zarkasyi, mengatakan “*Kunjungan Dubes Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik di Pondok Gontor untuk belajar mengenai toleransi. Pondok Gontor diibaratkan sebagai miniatur Indonesia yang terdapat ribuan santri dengan berbeda latar belakang serta ras. Namun dengan perbedaan tersebut, seluruh santri di Gontor bisa saling menghargai, sedangkan sebagian besar muslim di Inggris merupakan imigran dari Bangladesh, Pakistan, dan India. Sikap keagamaan mereka berbeda dengan muslim di Indonesia*” (<http://www.solopos.com/2017/04/27>).

Dengan belajar nilai toleransi dari Pondok Gontor diharapkan muncul sikap toleransi minimal dari para alumninya. Apabila santri Gontor sudah terbentuk menjadi masyarakat yang toleran, tentu akan mencerminkan sikap keadilan dalam setiap tindakannya. Dengan demikian hukum akan tegak karena kesadaran masyarakatnya. Selama ini kita hanya membahas kasus intoleransi. Penting bagi siapa pun yang peduli dengan perkembangan demokrasi, kebebasan beragama dan toleransi untuk berbicara terbuka dan lantang tentang kasus-kasus intoleransi. Terutama pemerintah Indonesia yang seharusnya berani mengambil langkah hukum dengan menuntut setiap pelaku ke meja hijau. Harus ada revisi aturan yang tidak lagi tepat diberlakukan dan tentunya pemberlakuan aturan baru yang lebih tepat. Selama ini toleransi dianggap sudah pada tahu karena ada dalam ajaran agama. Padahal seharusnya menjadi materi khusus yang disampaikan dalam dunia pendidikan dan para pemuka agama dalam dakwah dan pernyataan-pernyataannya. Demikian juga yang menjadi anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) jangan hanya bersifat formalitas dan hanya bertemu jika ada kasus saja, tapi diharapkan bisa menjadi gerakan toleransi bersama. Karena sejatinya

FKUB bisa mewadahi kegiatan bersama antar semua pemeluk agama.

KESIMPULAN

Dari beberapa uraian sebelumnya dapat dikemukakan hal-hal berikut ini: *Pertama*, toleransi Islam lebih dari sekedar toleransi atau kemauan untuk menerima ketidaksepakatan yang genuine tapi di dalamnya juga terkandung ihsân (kebaikan) kepada orang lain yang membawa kecintaan kepada seseorang yang diberikan kepadanya kebaikan, dan mengarahkan pada kecintaan, keharmonisan, serta menjauhkan manusia dari kekerasan dan alienasi. *Kedua*, Dalam Sejarah Peradaban Islam Toleransi dalam Islam tidak hanya tertulis secara Nash, tapi telah diterapkan dalam kehidupan Umat Islam dalam bermasyarakat. *Ketiga*, Berbicara tentang toleransi kita bisa belajar dari potret Pondok Pesantren Gontor Ponorogo. *Keempat*, Gagasan untuk membangun Gontor menjadi pondok pesantren yang menanamkan nilai-nilai toleransi berawal dari situasi sosial dan politik bangsa Indonesia berpengaruh pula pada pendidikan. *Kelima*, dalam konteks pondok Gontor, pendidikan berwawasan toleransi sesungguhnya telah menjadi pendidikan dasar yang tidak hanya diajarkan dalam pengajar formal di kelas saja. Tapi juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari santri. *Keenam*, keutamaan pendidikan toleransi di pondok Gontor juga tercermin dari muatan atau isi kurikulum yang kentara mengajarkan wawasan santri akan keragaman keyakinan. *Ketujuh*, pondok Gontor diibaratkan sebagai miniatur Indonesia yang terdapat ribuan santri dengan berbeda latar belakang serta ras. Namun dengan perbedaan tersebut, seluruh santri di Gontor bisa saling menghargai.

DAFTAR PUSTAKA

- Zarkasyi, Abdullah Syukri. 2005. *Manajemen Pesantren: Pengalaman Pondok Modern Gontor*, Ponorogo: Trimurti Press
- Ryandi. 2013. *Antara Pluralisme Liberal dan Toleransi Islam*, Jurnal KALIMAH, Vol. 11, No. 2, September 2013 diakses dari <https://scholar.google.co.id/>
- al-Thabari Abu Ja'far, Muhammad bin Jarir. 1407 H. *Tarikh al-Umam wa al-Mulk*, Juz: 2, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, Cet. 1
- Maksum, Ali. 2015. *Model Pendidikan Toleransi Di Pesantren Modern Dan Salaf*, Jurnal Pendidikan Agama Islam Volume 03, Nomor 01, Mei 2015 diakses <https://scholar.google.co.id/>
- Taqiyuddin Abu al-'Abbas Ahmad bin 'Abdul Halim Ibn Taymiyah al-Harrani. 1426 H. *Majmu' Fatawa*, Juz: 18, Tahqiq: Anwar al-Baz dan 'Amir al-Jazaar, Daar al-Wafa', Cet. 3
- Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah al-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz: 6, Qohirah: Mu'assasah Qurtubah
- Syauqi Abu Khalil. 1988. *al-Tasamuh fi al-Islam: al-Mabda' wa al-Tathbiq*, Libanon: Daar al-Fikr
- Hikmat bin Basyir bin yasin. 1992. *Samahatu al-Islam fi al-Ta'amul ma'a Ghair al-Muslimin*, Madinah: Kulliyat al-Qur'an wa al-Dirasat al-Islamiyah al-Jami'ah al-Islamiyah
- Al-Thabari, Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amali Abu Ja'far. 1420 H. *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. Juz: 2. Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir. Mu'assasah ar-Risalah, Cet. 1.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 2005. *Ghairu al-Muslimin fi al-Mujtama' al-Islami*. Kairo: Maktabah Wahbah

Ibnu Qayyim al-Jauziy. 1997. *Ahkam Ahli Dzimmah*, Juz. 3, Ed. Muhammad bin Abi Bakr Ayub al-Zar'i Abu 'Abdullah, Beirut: al-Dimam, Cet. 1

Tim Penyusun. 1960. *Kulliyatu al-Mu'allimin al-Islamiyah, dalam Penggal I Sejarah Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor Indonesia*. Ponorogo: Sekretariat PMDG

Riza Zahrial Falah (Dosen STAIN Kudus & Alumni Pesantren Gontor), Wawancara pada 20 Desember 2017.

<https://www.voaindonesia.com/a/intoleransi-di-indonesia-darurat/3643180.html>

<http://nasional.kompas.com/read/2017/01/05/18280081/catatan.komnas.ham.kasus.intoleransi.meningkat.setiap.tahun>

<http://ksm.ui.ac.id/mengusut-kasus-intoleransi-di-indonesia-siapa-yang-sebenarnya-memecah-belah-nkri/>

<http://www.solopos.com/2017/04/27/dubes-inggris-belajar-tentang-toleransi-di-pondok-gontor-ponorogo-812857>

<https://www.gontor.ac.id/selayang-pandang>

<https://www.gontor.ac.id/latar-belakang>

<https://www.gontor.ac.id/gagasan-dan-cita-cita>